

KOMUNIKASI POLITIK—SUFISTIK: SEBUAH SINTESIS DARI KAJIAN PUSTAKA SISTEMATIS

SUFISTIC—POLITICAL COMMUNICATION: A SYNTHESIS FROM SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

¹⁾ Ima Rahmatul Karimah, ²⁾ Dini Anjani Nurlatifah, ³⁾ Muhammad Salman Abidin

^{1,2,3)} Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Program Pascasarjana,

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,

Jalan Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

E-mail: ima.rahmatul@gmail.com,¹ andininurlatifah35@gmail.com,² muhsaldin@gmail.com,³

ABSTRAK

Artikel ini mengonseptualisasikan komunikasi politik—sufistik sebagai suatu bentuk interaksi yang khas, di mana para sufi dapat menjaga eksistensi mereka dalam pusaran kekuasaan tanpa kehilangan kedekatan dengan masyarakat. Melalui kajian pustaka sistematis yang melibatkan 21 artikel dalam indeks Scopus, artikel ini membuka wawasan tentang bagaimana komunikasi politik—sufistik dapat berfungsi sebagai jembatan antara kekuatan spiritual dan kekuasaan politik. Sintesis dari berbagai artikel menunjukkan bahwa komunikasi politik-sufistik melibatkan relasi kuasa vertikal dan horizontal dengan elemen kosmopolitan dan esoterisme. Relasi vertikal menggambarkan hierarki kekuasaan, dimana menjelaskan peran para sufi sebagai perantara kekuasaan. Relasi horizontal menekankan keterlibatan sosial sufi di masyarakat, dengan modal spiritual yang dianggap sepadan dengan modal politik. Faktor lainnya terkait dengan waktu dan kehidupan, dimana walaupun telah tiada, seorang sufi dianggap memiliki kekuatan politik. Komunikasi politik-sufistik sering disampaikan melalui media sastra dengan unsur esoteris, bersifat rahasia dan eksklusif, hanya dipahami oleh kalangan sufi. Hal ini memungkinkan mereka berkembang tanpa mengganggu kekuasaan yang ada. Artikel ini juga menawarkan pandangan untuk penelitian lebih lanjut dengan berbagai metodologi guna memahami fenomena kelompok sufi dalam konteks kekuasaan, serta mengaitkan dinamika ini dengan isu-isu kontemporer seperti modernisme dan salafisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika politik Islam di era modern.

Kata Kunci: Komunikasi politik, sufisme, esoterisme, tasawuf, kajian pustaka sistematis

A.PENDAHULUAN

Dalam sejarah panjang peradaban Islam, para sufi telah memainkan peran yang signifikan dalam dinamika kekuasaan. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga merambah ke dalam arena politik dan pemerintahan. Sejak zaman pemerintahan Islam di Andalusia (Spanyol), para sufi telah hadir di tengah-tengah relasi kekuasaan, bahkan mampu bertahan dan berkembang dalam periode yang penuh tantangan seperti era Turki-Mongol pada abad ke-13 Masehi (Sharify-Funk et al., 2018). Keterlibatan mereka dalam pemerintahan pada masa itu tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif, di mana pemikiran dan praktik sufistik turut mendorong terciptanya abad keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi (Renima et al., 2016). Secara keseluruhan, keterlibatan para sufi dalam dinamika kekuasaan mencerminkan sifat adaptif dan relevansi ajaran mereka dalam berbagai konteks sejarah. Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, mereka tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip spiritual yang dapat membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna.

Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa sufisme tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara keadilan sosial dan merawat hubungan yang harmonis antarindividu dalam masyarakat.

Fenomena yang sama juga terlihat dalam sejarah Indonesia. Sufisme di Nusantara telah berperan penting sejak zaman kerajaan hingga era republik. Proses Islamisasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufistik, yang pada akhirnya mengkristal dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan kesultanan-kesultanan lain di berbagai wilayah nusantara. Penelitian Nurhuda (2023) memperlihatkan bahwa nilai-nilai sufisme tersurat dalam ideologi Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara sufisme dan kekuasaan tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga dalam pembentukan negara modern. Maka dari itu, sufisme bukan hanya menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Pada awal abad ke-21, eksistensi sufisme dalam ranah kekuasaan di Indonesia semakin nyata dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden. Gus Dur, yang merupakan tokoh sufi terkemuka, menjadi simbol bagaimana nilai-nilai sufistik dapat diterjemahkan dalam praktik politik di Indonesia (Masduki, 2016). Kepemimpinan Gus Dur memperlihatkan bagaimana pendekatan sufistik dapat berkontribusi pada kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam masa jabatannya, ia sering mengedepankan dialog antaragama dan memperjuangkan hak-hak kaum marginal, yang sejalan dengan ajaran sufisme tentang kasih sayang dan empati. Hal ini menunjukkan bahwa sufisme tidak hanya berfungsi sebagai penguat identitas spiritual, tetapi juga sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan politik yang berimplikasi luas bagi masyarakat. Hingga saat ini, seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang, suara kelompok sufi di Indonesia tetap menjadi perhatian penting, bahkan dalam kontestasi politik pemilu 2024 (Barokah, 2023). Oleh karena itu, peran sufisme dalam ranah kekuasaan di Indonesia menunjukkan bahwa tradisi spiritual ini tetap relevan dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah politik dan sosial bangsa. Melalui gambaran tersebut, tampak bahwa terdapat hubungan yang khas dan mendalam antara komunikasi politik dan sufisme. Hubungan ini membuka ruang bagi pemahaman baru tentang bagaimana dua konsep yang tampak berbeda ini dapat bersinergi dan menciptakan sebuah sintesis yang unik. Artikel ini akan mengeksplorasi lebih lanjut hubungan tersebut melalui kajian pustaka sistematis, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang komunikasi politik-sufistik dalam konteks sejarah dan kontemporer.

Sufisme, sebagai suatu tradisi spiritual, tidak hanya berfokus pada dimensi individu dan batiniah, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan. Para sufi sering kali terlibat dalam dinamika kekuasaan dan relasi sosial, menggunakan ajaran mereka untuk mempromosikan keadilan, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik yang dihasilkan dari praktik sufistik menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur ini, memungkinkan mereka untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kelompok sufi menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menjaga relevansi politik mereka

Menggunakan metode kajian pustaka sistematis, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai panduan bagi para peneliti, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam memahami peran sufisme dalam konteks politik saat ini. Dengan memberikan wawasan yang lebih luas tentang komunikasi politik-sufistik, diharapkan artikel ini dapat memperkaya diskusi tentang pentingnya spiritualitas dalam kehidupan sosial dan politik, serta mendorong refleksi mendalam tentang bagaimana ajaran sufistik dapat terus menjadi sumber inspirasi bagi perubahan yang positif dalam masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

Bagi beberapa penulis muslim, sufisme ialah inti spiritual dari Islam –dianalogikan sebagai kalbu dan ruh. Di kalangan muslim lain, para pendakwah dengan keras dari balik mimbar mengecam sufisme yang dianggap sesat dan berbahaya (Sharify-Funk et al., 2018, hal. 35). Sufisme memercayai narasi al-Quran bahwa Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa (nabi-nabi yang disebut tradisi agama

abrahamik lainnya) sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dari sudut pandang ini, ajaran tasawuf memercayai bahwa sepanjang sejarah, manusia senantiasa dipandu oleh wahyu Ilahi (Sharify-Funk et al., 2018, hal. 36). Meskipun Islam lahir di Arab, ‘kematangannya’ sebagai ajaran hukum, teologi dan spiritual terjadi di Damaskus, Kairo, dan Baghdad, sama halnya seperti di Mekah. Berbagai metropolis di Timur-Tengah ini kemudian menjadi bejana yang memungkinkan pertukaran gagasan dan budaya (Sharify-Funk et al., 2018, hal. 37).

Walaupun Islam pada mulanya tidak mengarahkan pengikutnya kepada monatisisme (pertapaan), para sufi menganggap aspek asketisme (memiskinkan diri, puasa rutin, mengurangi tidur dan memperbanyak ibadah malam) dianggap telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga, asketisme dianggap sebagai bentuk kehidupan yang ideal bagi para sufi (Sharify-Funk et al., 2018, hal. 37). Seiring perkembangan Islam di jazirah Arab, beberapa muslim yang taat merasa bahwa ajaran al-Quran tentang rajin beribadah dan meninggalkan keduniawian semakin luntur di tengah masyarakat. Atas keprihatinan ini, pada abad ke-7 Masehi muncullah orang-orang yang disebut sebagai zuhud (*asketis*) dan ‘*ubbad* (ahli ibadah) sebagai pembaharu yang dikenal atas kemiskinan, puasa, dan ketakwaan mereka yang luar biasa (Sharify-Funk et al., 2018, hal. 37).

Aspek zuhud ini kemudian yang menjelaskan hubungan antara sufi dan dunia politik. Kezuhudan tidak hanya membantu seorang sufi dalam meningkatkan strata spiritualnya, melainkan juga dapat menjadi dasar untuk kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan (Muedini, 2015, hal. 24). Adapun, pada tingkatan lain praktik kezuhudan juga membuat seseorang dapat benar-benar meninggalkan keduniawian. Gagasan zuhud ini kemudian senantiasa dikomunikasikan, termasuk dalam kancah politik. Hasan al-Basri, dalam komunikasinya dengan Kalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyatakannya keprihatinannya dengan dunia materi dan mengajak untuk mengabdikan hidup untuk berserah dan mendekatkan diri dengan Allah (Muedini, 2015, hal. 25).

Surat dari Hasan al-Basri tersebut kemudian dapat disebut sebagai komunikasi politik. Secara formal, komunikasi politik didefinisikan sebagai “produksi dan pengaruh dari pesan politis, kampanye dan pariwisata yang melibatkan media massa” (Chandler, 2011). Sementara itu, dalam makna yang lebih halus, komunikasi politik didefinisikan sebagai “pertukaran informasi, pesan dan simbol ...guna mencapai keseimbangan kekuatan dalam tatanan masyarakat” (McLeod et al., 2009). Seiring dengan perkembangannya, sufi dianggap menggunakan politik –dalam lingkup hak asasi manusia, keadilan sosial, dsb., secara teori dan praktis guna mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah (Muedini, 2015, hal. 26). Terkait dengan gagasan-gagasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa komunikasi politik yang digunakan oleh kalangan sufi terkait dengan upaya menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Asumsi tersebut kemudian disokong oleh pemikiran para pembaharu. Sayyid Hossen Nasr (dalam Muedini, 2015, hal. 26) menyatakan bahwa sufi dapat menggunakan berbagai upaya dalam membimbing manusia menuju alam berikutnya.

Gagasan keseimbangan ini kemudian didukung oleh Heck (dalam Muedini, 2015, hal. 26) yang menyatakan bahwa orang-orang sufi senantiasa berperan sebagai mitra bahkan lawan dari sultan dalam berkomunikasi untuk menegosiasikan kepentingan, nilai-nilai, dan keseimbangan dalam masyarakat. Diperhitungkannya orang-orang sufi ini kemudian terkait dengan ‘perpanjangan keberkahan’ dan otoritas spiritual yang mereka miliki. Ordo sufistik (tarekat) khususnya para pemimpinnya tidak hanya memiliki kemampuan dalam mempengaruhi keagamaan masyarakat, melainkan juga dapat menggerakkan mereka secara sosial dan politik. Hal inilah yang menjelaskan mengapa sebagian pemimpin politik senantiasa peduli akan kehadiran mereka dan tidak segan untuk memberikan insentif yang digunakan untuk menyorot kedekatan suatu entitas politik dengan lingkungan sufistik (Muedini, 2015, hal. 31–32). Gagasan-gagasan di atas kemudian dapat digunakan sebagai landasan yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai sufisme dikomunikasikan di tatanan masyarakat, bahkan dunia politik. Secara garis besar, komunikasi politik yang digunakan oleh kalangan sufi digunakan untuk mempromosikan keseimbangan –tidak hanya keseimbangan di tatanan sosial, namun juga mengajak manusia untuk

C.METODE

Linnenluecke dkk. (2020) menyatakan bahwa kajian pustaka sistematis secara garis besar terdiri dari empat langkah. Langkah pertama ialah mengidentifikasi literatur yang akan dilibatkan. Pencarian di sistem indeks Scopus pada tanggal 8 Agustus 2024 menunjukkan setidaknya terdapat 21 artikel yang ditemukan menggunakan kata kunci: TITLE-ABS-KEY ((tasawwuf OR sufi*) AND politic* AND communicat*). 21 artikel tersebut kemudian memasuki langkah kedua, pembersihan data. Strategi pembersihan data dilaksanakan menggunakan penyaringan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria penyeleksian artikel

No.	Penyaringan	Kriteria	Artikel yang tersedia
1	Bahasa	Inggris	16
2	Jenis	Artikel Jurnal	9
4	Relevansi	Terkait dengan tema komunikasi politik dan sufisme	5

Kelima artikel yang tersedia kemudian dianalisis dan disintesis (langkah 3) serta dipaparkan (langkah 4) dalam bentuk yang mudah dipahami.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan gambaran umum artikel-artikel yang ada dalam penelitian ini. Secara garis besar, literatur-literatur tersebut membahas fenomena politik yang ada di tengah masyarakat sufi baik secara historis maupun kontemporer.

Tabel 2. Matriks rangkuman artikel yang dikaji

No.	Penelitian	Konteks	Metode	Temuan
1.	(Philippon, 2012)	Tempat bersejarah sufi dinilai memiliki kapasitas dalam memobilisasi dukungan politik	Studi kasus pada makam keramat dan peringatan wafatnya (haul) wali di Lahore, Pakistan	Negara dapat mengeksploitasi kegiatan ziarah sebagai panggung politik guna berkomunikasi dengan masyarakat melalui makna simbolis dan emosional
2.	(Banerjee, 2017)	Bagaimana kalangan sufi di abad ke-16 Masehi dapat masuk ke dalam jejaring elite di rezim Mughal	Prosopography pada kitab Akhbar al-Akhyar karya ‘Abd al-Haqq Muhaddis Dehlawi (1551-1642)	Kekosongan kekuasaan kesultanan Delhi diisi oleh para ulama sufi yang mampu menarik murid yang takjub akan kemampuan spiritual mereka
3.	(Wintersteiger, 2020)	Pemikiran filsuf Islam seperti al-Farabi dan Ibn Rushd terkait dengan komunikasi politik esoterik ala Plato	Studi kasus terhadap kitab Fasl al-Maqal karya Ibn Rushd dan literatur-literatur pendukung lainnya	Gaya penulisan para filsuf Islam dinilai memiliki tujuan untuk membangun persekutuan politik antara para filsuf dan para pangeran (pemangku kekuasaan) yang tercerahkan (<i>enlightened</i>)
4.	(Gaiind-Krishnan, 2020)	Bagaimana musik bisa menjadikan sufisme diterima dalam tatanan politik	Studi kasus terhadap diaspora transformasi musik Qawawali	Dunia yang semakin global membentuk menjadikan para musisi Qawwali tidak terjebak dalam kaidah dan pakem musik yang ada. Mereka kemudian

				menekankan kepada ‘rasa’ saripati dari pengabdian seorang Sufi
5.	(Sommerfelt, 2024)	Bagaimana ziarah berpotensi dalam mewujudkan politik kemanusiaan	Etnografi terhadap masyarakat Niimi di Gambia	Kegiatan ziarah membuat kita menyadari bahwa orang yang sudah meninggal pun memiliki kekuatan politik

Philippon (2012) menemukan bahwa Pakistan memiliki Kementerian Wakaf yang sejak tahun 1950-an berupaya dalam ‘menasionalkan’ berbagai tempat yang memiliki signifikansi sejarah-religius. Salah satu yang menjadi perhatian ialah makam dari Wali di kota Lahore, Syed Ali Bin Uthman al-Hujwari. Situs tersebut dikelola oleh satu orang administrator, 48 staf kantor, dan 12 khadim (pelayan). Di luar dari para pegawai Kementerian Wakaf, unsur pendukung yang penting lainnya berasal dari para relawan yang berjumlah ratusan orang. Nasionalisasi situs ziarah ini pada mulanya dianggap sebagai upaya dalam mentransfer relasi kekuatan antara rakyat—makam menjadi rakyat—pemerintah—makam. Relasi kuasa ini kemudian menjadi semakin rumit dengan banyaknya unsur politik yang terlibat di dalamnya. Kementerian Wakaf menunjuk komite pada penyelenggaraan ada suatu kegiatan yang besar. Komite tersebut terdiri dari kalangan keluarga politik yang berkuasa di daerah makam tersebut. Pembesar-pembesar dan para politisi tingkat nasional tidak mau ketinggalan dalam mengikuti acara tersebut. Kehadiran para politisi pada kesempatan haul dinilai dapat meningkatkan popularitas mereka karena pada kegiatan tersebut (Philippon, 2012, hal. 295). Kajian ini menggambarkan bagaimana negara menggunakan elemen-elemen keagamaan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaannya. Dengan mengontrol situs-situs religius yang memiliki signifikansi sejarah dan spiritual, pemerintah dapat mempengaruhi relasi kekuasaan antara rakyat dan negara, serta memanfaatkan acara-acara keagamaan untuk meningkatkan popularitas politik. Keterlibatan politisi dalam acara-acara seperti haul, yang dihadiri oleh masyarakat luas, menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam konteks sufistik tidak hanya berfokus pada pesan religius, tetapi juga bagaimana simbol-simbol keagamaan digunakan untuk kepentingan politik, memperkuat pengaruh, dan legitimasi di mata publik. Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas interaksi antara agama, kekuasaan, dan politik dalam konteks masyarakat Muslim, serta bagaimana elemen sufistik dapat dimobilisasi untuk tujuan politik.

Sommerfelt (2024) juga mengkaji fenomena ziarah serupa yang terjadi di Gambia. Tidak seperti yang terjadi di Lahore, kegiatan ziarah ini belum ‘dinasionalisasikan’ dimana masih dikelola secara kekeluargaan. Adapun, kegiatan ziarah ini kemudian dianggap memiliki unsur politik karena dapat digunakan sebagai momentum dalam unjuk kekayaan dengan memberikan suguhan yang melimpah kepada para tamu undangan (Sommerfelt, 2024, hal. 58). Pada akhirnya, kegiatan ziarah dapat dianggap sebagai aktualisasi dari jejaring yang luas, dimana sumber daya, materi dan upaya keagamaan menghubungkan dan menghubungkan kembali manusia, (pemuka agama) yang sudah meninggal, dan Sang Maha Kuasa. Ziarah kemudian dianggap sebagai suatu kegiatan yang melampaui garis-garis spiritual dan memungkinkan dalam membawa arus keberkahan sebagai hasil dari pengabdian keagamaannya. ‘aliran keberkahan’ ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan persatuan kosmos spiritual (Sommerfelt, 2024, hal. 60). Praktik ziarah di Gambia menggambarkan bagaimana hubungan sosial dan keagamaan terjalin dalam suatu jaringan yang luas, menghubungkan individu dengan pemuka agama yang telah meninggal dan dengan Sang Maha Kuasa. Dengan demikian, ziarah menjadi lebih dari sekadar ritual spiritual; ia berfungsi sebagai medium untuk menciptakan dan memperkuat ikatan sosial, serta menyebarkan ‘aliran keberkahan’ yang dapat dirasakan oleh peserta. Hal ini menunjukkan bahwa ziarah memiliki dimensi yang melampaui aspek religius dan dapat berkontribusi pada pembentukan identitas dan solidaritas komunitas, serta membawa pengaruh terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

Di luar bentuk kegiatan ziarah, pengenangan terhadap orang-orang sufi terdahulu juga dituangkan dalam bentuk kesusastraan *tazkirat* (biografi). Teks-teks ini dianggap sebagai

penghormatan bagi kalangan elite muslim dan membuat ‘ruang urban Muslim’ menjadi otentik; serta merupakan ‘komunikasi memoratif’ untuk menyebarluaskan warisan para pahlawan dan tokoh-tokoh terdahulu kepada generasi muslim di hari ini (Banerjee, 2017, hal. 451). Biografi dan silsilah kemudian dianggap berperan dalam membangun identitas kosmopolitan trans-regional yang memungkinkan dalam menghubungkan masa lampau dan hari ini. Di luar bentuk kegiatan ziarah, pengenangan terhadap orang-orang sufi terdahulu juga dituangkan dalam bentuk kesusastraan *tazkirat* (biografi). Teks-teks ini dianggap sebagai penghormatan bagi kalangan elite muslim dan membuat ‘ruang urban Muslim’ menjadi otentik; serta merupakan ‘komunikasi memoratif’ untuk menyebarluaskan warisan para pahlawan dan tokoh-tokoh terdahulu kepada generasi muslim di hari ini (Banerjee, 2017, hal. 451). Biografi dan silsilah kemudian dianggap berperan dalam membangun identitas kosmopolitan trans-regional yang memungkinkan dalam menghubungkan kehidupan sosial di masa lampau dan hari ini. Oleh karenanya, *tazkirat* kemudian menciptakan suatu ruang politik bagi orang-orang yang berelasi –baik secara keturunan maupun keilmuan, dengan orang-orang terdahulu (Banerjee, 2017, hal. 452). Banerjee (2017, hal. 453) kemudian menganggap bahwa adanya *tazkirat* menunjukkan bahwa tegaknya Islam tidak hanya terkait dengan kekuasaan politik dan militer saja. Penyebaran ilmu pengetahuan Islam oleh para ulama dianggap pengabdian yang setara dengan upaya politik dan militer. Dengan demikian, *tazkirat* berperan penting dalam memahami bagaimana narasi sejarah dan tradisi keagamaan berkontribusi terhadap identitas kolektif dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Muslim, serta bagaimana komunikasi tersebut berfungsi dalam konteks yang lebih luas.

‘Pengabdian’ (*devotion*) juga dibahas Gaiind-Krishnan (2020) yang meneliti tentang musik Qawwali di tengah diaspora politik Islam di India. Menurutnya, diterimanya budaya sufi secara transnasional terkait dengan kosmopolitanisme spiritual. Konsep ini juga disinggung oleh Sommerfelt (2024) yang menyatakan bahwa kosmopolitanisme merupakan bagian dari ajaran Islam, karena seluruh manusia dipandang sebagai satu kesatuan umat. Adapun, dari fenomena ziarah yang ditelitinya, ia menemukan bahwa kosmopolitanisme melampaui batasan hidup dan mati. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa pengabdian dalam tradisi sufi dan kosmopolitanisme spiritual memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara jaringan global umat Muslim, menghubungkan masa lampau dan masa kini, serta mengatasi batasan-batasan yang membatasi identitas dan komunitas.

Wintersteiger (2020) kemudian membahas lebih mendalam terkait dengan kaidah komunikasi politik esoterik Ibn Rushd yang dinilai memiliki nuansa pemikiran Aristoteles. Aristoteles membagi penalaran menjadi beberapa tingkatan, dimana penalaran demonstratif berada pada posisi tertinggi. Penalaran demonstratif melibatkan bukti-bukti yang jelas dan diasosiasikan dengan penyelidikan ilmiah yang mencari kebenaran hakiki. Sementara itu, penalaran dialektis terkait dengan perdebatan dan pendiskusian kemungkinan akan adanya kebenaran berdasarkan gagasan yang diterima secara umum, dimana dianggap sebagai tingkatan kedua. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah komunikasi seperti dialektika dan retorika (Comas, 2004). Ibn Rushd (dalam Wintersteiger, 2020, hal. 592) kemudian membangun suatu hierarki sosial berdasarkan tingkatan pemahaman manusia. Dengan membangun hierarki sosial berdasarkan tingkatan pemahaman manusia, Ibn Rushd menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan kebenaran. Ini menciptakan dinamika kekuasaan yang berhubungan dengan siapa yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan kebenaran dan bagaimana komunikasi digunakan dalam politik untuk membentuk pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Rushd tentang penalaran dan komunikasi menjadi relevan untuk memahami hubungan antara agama, politik, dan ilmu pengetahuan dalam konteks sufisme dan masyarakat Muslim yang lebih luas.

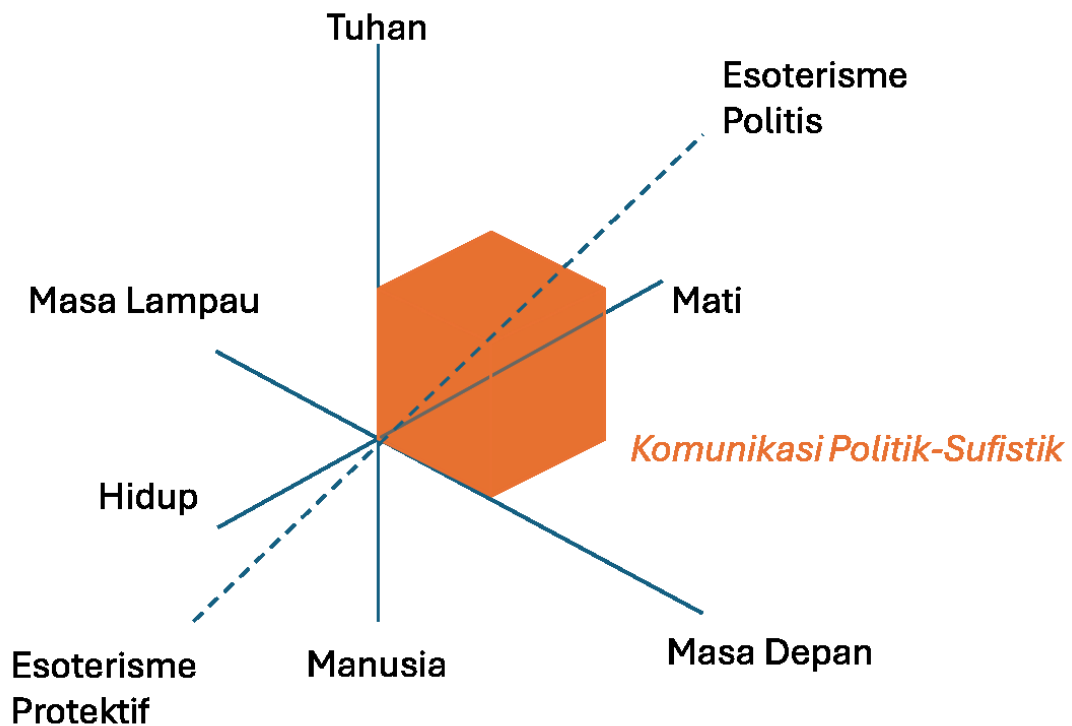
Berdasarkan pemikiran di atas, seharusnya seseorang dalam berpolitik menggunakan pernyataan-pernyataan yang demonstratif dan nyata dalam memaparkan suatu kebenaran. Adapun, kebenaran dalam politik bisa menjadi masalah dan malah membahayakan orang-orang. Sehingga, pada mulanya aliran sufistik disebut sebagai ajaran ‘esoterisme protektif’ karena berupaya dalam menjaga masyarakat awam dari ‘kebenaran yang berbahaya’. Adapun, perkembangan terkini menunjukkan adanya suatu gerakan ‘esoterisme politis’ yang bertujuan untuk secara aktif bersaing

dengan sistem tradisional yang ada (Wintersteiger, 2020, hal. 590). Ajaran sufistik senantiasa menekankan aspek ‘kerahasiaan’ dalam setiap segi kehidupannya. Apa yang disebut dengan komunikasi politik-esoteris kemudian bersifat moderat, di tengah-tengah esoterisme protektif dan politis. Gerakan politik yang dilakukan oleh para sufi kemudian disebut sebagai esoterisme defensif. Mereka tidak berupaya dalam membongkar ‘rahasia’ ke khalayak umum –dimana perbuatan ini dianggap haram oleh Ibn Rusyd (Wintersteiger, 2020, hal. 593). Yang kemudian dilakukan oleh kalangan sufi ini kemudian ‘mengelabui sensor (otoritas)’ dengan kaidah-kaidah komunikasi dan bahasa yang sublim (halus). Pendekatan ini menunjukkan bahwa para sufi menggunakan strategi komunikasi yang cermat untuk mempertahankan posisi mereka dan menyampaikan pesan-pesan politik tanpa menghadapi risiko yang besar. Dalam konteks ini, komunikasi politik-esoteris menjadi alat penting bagi para sufi untuk menavigasi lingkungan politik yang kompleks, sekaligus menjaga integritas ajaran mereka dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif kebenaran yang tidak terfilter.

Orang-orang arif (*sages*) di seluruh dunia pada masa lampau senantiasa menggunakan kaidah esoterisme defensif ini. Mereka sering kali menyembunyikan argumen inti esoteris (batiniyah) dibalik permukaan eksoterik (lahiriah) mereka (Wintersteiger, 2020, hal. 588). Orang-orang arif ini sering bersembunyi dibalik arketipe ‘sang ahli mistis pemabuk’ (*the drunken mystic*) (Wintersteiger, 2020, hal. 590). Gambaran ini ditemukan dalam perwatakan Abu Nawas, yang walaupun digambarkan sebagai seorang pemabuk dan nyeleneh, namun senantiasa setia menemani dan memberikan nasihat kepada Khalifah Harun al-Rasyid saat menghadapi persoalan-persoalan yang pelik (Winstedt, 1920). Status Abu Nawas yang dipandang sebagai orang biasa tidak menghalanginya untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari berbagai kalangan. Hal ini karena ia memiliki kemampuan untuk memenangkan negosiasi dalam membela orang-orang miskin. Kapabilitas logis dan puitis Abu Nawas memberikan ia kapital simbolis yang memiliki nilai jual dan daya saing dengan kalangan elite (Rahayu, 2022). Hal ini menggambarkan pentingnya komunikasi yang kreatif dan strategis dalam dunia politik dan sosial, di mana orang-orang arif dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan, serta menegaskan posisi mereka dalam tatanan sosial yang lebih besar.

Kapital simbolis dari para sufi ini kemudian senantiasa dirayakan oleh umat muslim sepanjang masa. Banerjee (2017, hal. 450) menunjukkan orang-orang *majzub* senantiasa diingat atas segala keajaiban yang mereka lakukan. *Majzub* terkait dengan orang-orang keramat dan juga *diwana* (orang-orang yang terlihat gila/hilang dalam lautan kebahagiaan Ilahi). Orang-orang ini kemudian berperan dalam pembangunan masyarakat Islam karena mereka dapat senantiasa menjadi rujukan dalam meminta nasihat (pelajaran), irsyad (bimbingan), dan *tarbiyah* (pendidikan). Kapital simbolis yang dibawa oleh orang-orang *majzub* ini dikomunikasikan dengan berbagai cara seperti *ta’lif* (lagu-lagu pujian), *makatib* (surat-surat) dan risalah yang menceritakan perjalanan spiritual mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfungsi sebagai tokoh spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu membentuk identitas kolektif umat Muslim dan mendukung pertumbuhan komunitas yang lebih dalam ikatan spiritual dan sosial.

Dari kelima artikel tersebut, dapat dibangun sintesis bahwa komunikasi politik—sufistik terkait dengan tema-tema menonjol dalam pembahasan relasi kuasa dengan unsur-unsur kosmopolitan dan esoterisme, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sintesis penelitian

Relasi kuasa dalam komunikasi politik—sufistik berbentuk garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal menggambarkan hierarki kekuasaan. Ketika mencapai tingkatan tertinggi, gelar wali acap disematkan kepada seorang sufi (Banerjee, 2017). Gelar tersebut merupakan term yang berasal dari istilah *waliyullah* (teman Allah). Tidak semua orang bisa menjadi wali atas upayanya, melainkan juga kewalian seseorang terkait dengan faktor rida Ilahi. Tanda bahwa seseorang telah menjadi wali ialah *kasyaf*, yaitu terbukanya segala jenis pengetahuan. Hubungan dengan Tuhan dalam pandangan sufistik kemudian tidak seperti sistem monarki, dimana seseorang yang dianggap telah mendapat mandat surgawi atau hak Ilahi dapat menjadi penguasa. Sebaliknya, ajaran sufi kemudian menekankan pada aspek pengabdian atau penghambaan (Gaind-Krishnan, 2020). Dengan demikian, kewalian dipandang sebagai hasil dari perjalanan spiritual yang tulus, di mana individu menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Ilahi. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi sufistik, pengabdian kepada Tuhan adalah jalan utama untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan yang lebih tinggi, mengedepankan nilai-nilai kerendahan hati dan dedikasi dalam praktik spiritual.

Adapun, ajaran sufisme tidak menekankan pada praktik ‘pertapaan’ atau pengasingan diri demi mencapai suatu tingkatan spiritual. Sebaliknya, seorang sufi lebih dianjurkan untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu kesulitan mereka. Relasi kuasa di masyarakat ini dapat bersifat kooperatif (Wintersteiger, 2020) atau menggerhanai status kekuasaan yang ada. Banerjee (2017) dan Wintersteiger (2020) sama-sama berargumen bahwa kapital spiritual yang dimiliki oleh seorang sufi secara hakikat dapat dianggap sama dengan kapital politik atau kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa secara vertikal terkait dengan konsep *hablum min-Allah* dan *hablum min an-nas*, yang merupakan ajaran bahwa seorang muslim harus dapat menjaga hubungan baik dengan Tuhannya dan manusia lainnya. Dengan demikian, sufisme menawarkan pendekatan yang holistik terhadap kehidupan sosial dan spiritual, menekankan keseimbangan antara pengabdian kepada Tuhan dan komitmen untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Garis relasi kuasa berikutnya terkait dengan dimensi waktu. Banerjee (2017) menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdahulu berpengaruh dengan perjalanan hidup seorang sufi. Philippon (2012) lebih jauh memperlihatkan bahwa kekuatan politik para Sufi tetap diperebutkan beratus tahun setelah mereka meninggal. Hal ini menciptakan konteks di mana warisan para sufi

menjadi alat untuk memperkuat identitas dan kekuasaan di kalangan kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian, relasi kuasa yang melibatkan dimensi waktu menunjukkan bahwa ajaran dan praktik sufisme tidak hanya relevan untuk konteks saat ini, tetapi juga berlanjut sebagai faktor yang memengaruhi dinamika sosial dan politik di masa depan.

Terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal, kalangan sufi masih menganggap para pendahulunya sebagai ‘sosok’ yang penting bagi kehidupan mereka. Walaupun jasadnya telah tiada, keberkahan mereka dianggap senantiasa ada dan hadir dalam membimbing kehidupan orang-orang yang masih ada. Hal tersebut kemudian terkait dengan gagasan kosmopolit. Kosmopolitan secara umum dimaknai sebagai warganegara (*politeia*) dunia (*cosmos*). Aristoteles mengklasifikasikan suatu konstitusi dengan memperhitungkan dua aspek, seberapa banyak warganegara yang memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, dan apakah kebijakan tersebut menguntungkan orang banyak atau hanya dirinya sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukan bahwa terdapat tiga jenis pemerintahan yang saleh (*virtuous*). Monarki ialah pemerintahan yang pandu oleh seorang yang paling saleh, aristokrasi dipandu oleh beberapa orang saleh dan *politeia* ialah suatu pemerintahan yang dipandu oleh banyak orang saleh (Aristotle, 2017). *Politeia* ini kemudian selaras dengan pandangan sufistik, namun dalam pandangan semesta yang berbeda.

Sementara itu, kosmos yang diterjemahkan sebagai ‘dunia’ merupakan definisi yang sempit. Banerjee (2017) dan Gaiind-Krishnan (2020) menunjukkan pandangan sufi terkait dengan kosmos versi sempit ini, dimana kosmopolitan terkait dengan penyebaran nilai-nilai sufistik secara transnasional. Kosmos juga dapat dimaknai sebagai semesta. Perspektif ini dapat ditemukan dalam gagasan Sommerfelt (2024) yang memandang baik orang yang hidup maupun mati sama-sama dipandang sebagai satu kesatuan manusia, termasuk keberkahan dan kearifan mereka semasa hidupnya. Pandangan kosmopolitan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik—sufistik ialah bentuk komunikasi yang sesuai dengan konsep *salih likulli zaman wal makan* (relevan dalam berbagai waktu dan tempat). Konsep ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang melibatkan partisipasi luas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan individu. Dalam konteks sufisme, gagasan kosmopolitan ini sejalan dengan pandangan bahwa para sufi, meskipun telah meninggal, tetap berperan dalam membimbing dan mempengaruhi masyarakat melalui warisan spiritual mereka. Ini mencerminkan keyakinan bahwa nilai-nilai spiritual dan etika yang baik harus melampaui batasan fisik dan waktu, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama di seluruh dunia.

Bentuk komunikasi politik–sufistik banyak digambarkan oleh Banerjee (2017), dimana media yang digunakan cenderung memiliki unsur kesusastraan, baik dalam bahasa tertulis maupun tertutur. Adapun, Wintersteiger (2020) menekankan bahwa kaidah komunikasi yang digunakan ialah terkait dengan konsep esoterik. Keilmuan Islam senantiasa memerhatikan luar-dalam kehidupan umatnya. Secara keilmuan, fikih terkait bagaimana suatu peribadatan terlihat dari luar (*lahiriyyah, exoteric*) sementara tasawuf terkait bagaimana komponen internal (*bathiniyyah, esoteric*) ‘bergerak’ ketika seseorang melaksanakan ibadah (Anieg, 2016, hal. 20). Orang-orang yang mendalami tasawuf menurut Wintersteiger (2020) dalam berpolitik juga akan membawa unsur esoteris ini. Kekhasan komunikasi esoteris ini ialah ‘kebohongan ganda’ yang digunakan untuk menyembunyikan kebenaran. Disembunyikannya kebenaran ini bukan dalam tujuan kemungkaran, melainkan secara politis agar suatu pesan diketahui oleh orang-orang di kalangan sufi saja. Komunikasi rahasia inilah yang menjadikan kalangan sufi dapat senantiasa berkembang, tanpa mengganggu hegemoni kekuasaan yang ada. Dengan pendekatan ini, para sufi dapat mengajukan kritik dan saran yang konstruktif terhadap kekuasaan yang dominan, sambil tetap menjaga integritas ajaran mereka dan melindungi komunitas mereka dari potensi konflik. Ini mencerminkan bagaimana komunikasi politik-sufistik dapat berfungsi sebagai alat untuk navigasi dalam konteks sosial yang kompleks, di mana para sufi berusaha mencapai perubahan positif tanpa harus terjebak dalam konflik terbuka dengan otoritas yang ada.

E. KESIMPULAN

Komunikasi politik-sufistik memainkan peran krusial dalam memungkinkan para sufi untuk menjaga eksistensi dan relevansi mereka di tengah dinamika politik yang sering kali kompleks dan berubah. Kesadaran akan kedekatan mereka dengan Tuhan memberikan mereka kekuatan spiritual yang mendalam, tetapi hal ini tidak membuat mereka arogan dalam menyikapi kekuasaan. Sebaliknya, para sufi menggunakan posisi ini untuk hadir di tengah masyarakat, berkontribusi pada tatanan sosial, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kasih sayang, toleransi, dan keadilan.

Kehadiran mereka yang tanpa sekat menciptakan ruang di mana para sufi dapat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, mereka menjalin hubungan yang kuat dengan komunitas, memungkinkan mereka untuk menjadi sumber inspirasi dan bimbingan. Kapital simbolis yang mereka miliki menjadikan mereka setara dengan para pemegang kekuasaan politik, menciptakan sinergi antara spiritualitas dan kepemimpinan yang konstruktif.

Lebih jauh lagi, sufisme menyadari pentingnya dimensi waktu dalam pengembangan spiritual. Dengan menghargai warisan orang-orang terdahulu, para sufi tidak hanya mengakui kontribusi mereka, tetapi juga membuka saluran untuk aliran keberkahan yang dapat mengalir ke generasi sekarang dan yang akan datang. Aliran keberkahan ini, meskipun bersifat abstrak, tidak dapat disalurkan melalui cara-cara konvensional, melainkan melalui bentuk komunikasi yang esoteris dan halus.

Komunikasi yang bersifat esoteris ini menciptakan jembatan antara pengalaman spiritual dan realitas sosial, di mana ajaran dan kebijaksanaan para sufi dapat disampaikan dengan cara yang lebih mendalam dan tersirat. Dengan demikian, para sufi mampu menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat, menjadikan sufisme sebagai kekuatan transformasional yang melampaui sekadar pengajaran spiritual. Ini menegaskan bahwa komunikasi politik-sufistik bukan hanya tentang mempertahankan keberadaan, tetapi juga tentang memperluas pengaruh dan menciptakan dampak yang bertahan lama dalam konteks sosial dan spiritual.

Artikel ini dapat dianggap sebagai upaya awal yang signifikan dalam mengonseptualisasikan komunikasi politik-sufistik, yang pada dasarnya bersifat halus dan sering kali tidak terdeteksi dalam dinamika sosial. Dengan mengidentifikasi unsur dan kaidah dalam komunikasi politik-sufistik, penelitian ini membuka jalan bagi peneliti di masa mendatang untuk lebih mudah memahami fenomena kelompok sufi yang beroperasi dalam konteks politik.

Fenomena ini dapat diteliti lebih lanjut menggunakan berbagai metodologi, seperti fenomenologi, studi kasus, atau etnografi, untuk menyelidiki bagaimana komunikasi politik-sufistik berfungsi dalam organisasi berbasis sufisme yang terlibat dalam kekuasaan, seperti Nahdlatul Ulama, Jemaah Tabligh, dan kelompok-kelompok lain. Dengan melakukan penelitian semacam itu, kita dapat lebih memahami relasi kuasa di antara kelompok-kelompok ini dan bagaimana mereka berinteraksi dengan isu-isu kontemporer, termasuk kemunculan kelompok Islam modernisme dan salafisme/wahabisme.

Melalui kajian-kajian yang lebih mendalam di masa mendatang, diharapkan kita dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik Islam di era kontemporer. Dengan menjelajahi komunikasi politik-sufistik, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai sufisme dapat berkontribusi dalam merespons tantangan sosial dan politik saat ini. Ini juga membuka ruang untuk dialog yang lebih luas mengenai peran spiritualitas dalam politik, serta bagaimana kelompok sufi dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga pada praktik nyata dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan di tengah keragaman.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anieg, M. (2016). Merasakan Tasawuf. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i1.870>
- Aristotle. (2017). *Politics: A New Translation* (C. D. C. Reeve (ed.)). Hackett Publishing Company, Inc.
- Banerjee, S. (2017). Conceptualising the past of the Muslim community in the sixteenth century: A prosopographical study of the Akhbār al-Akhyār. *Indian Economic and Social History Review*, 54(4), 423–456. <https://doi.org/10.1177/0019464617728221>
- Barokah, F. (2023). Misticisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.13275>
- Chandler, D. (2011). *A Dictionary of Media and Communication*. Oxford University Press.
- Comas, J. (2004). Dialectical Reasoning in Aristotle’s Theory of Rhetoric. In *Resources in Rhetorical Studies*. Middle Tennessee State University.
- Gaind-Krishnan, S. (2020). Qawwali routes: Notes on a sufi music’s transformation in diaspora. *Religions*, 11(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/rel11120685>
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175–194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Masduki, A. (2016). The Social Construction of New Understanding Wali in Java. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 1(2), 189–210. <https://doi.org/10.22515/dinika.v1i2.106>
- McLeod, D., Kosicki, G., & McLeod, J. (2009). Political communication effects. *Media effects: Advances in theory and research*, 228–251.
- Muedini, F. (2015). What Is Sufism? History, Characteristics, Patronage, and Politics. In *Sponsoring Sufism: How Governments Promote “Mystical Islam” in their Domestic and Foreign Policies* (hal. 19–41). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137521071_2
- Nurhuda, A. (2023). Sufism Values in Pancasila as the Nation’s Ideology. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(3), 102–107. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.53>
- Philippon, A. (2012). The ’urs of the patron saint of Lahore: National popular festival and sacred union between the Pakistani State and society? *Social Compass*, 59(3), 289–297. <https://doi.org/10.1177/0037768612449714>
- Rahayu, M. (2022). The Discourse of Common People Represented in Javanese Version of Abu Nawas Stories. *International Symposium on Religious Literature and Heritage*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.020>
- Renima, A., Tiliouine, H., & Estes, R. J. (2016). The Islamic Golden Age: A Story of the Triumph of the Islamic Civilization. In *The State of Social Progress of Islamic Societies* (hal. 25–52). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24774-8_2
- Sharify-Funk, M., Dickson, W. R., & Xavier, M. S. (2018). *Contemporary Sufism: Piety, Politics, and Popular Culture*. Routledge.
- Sommerfelt, T. (2024). Politics of Shared Humanity: On Hospitality, Equality and the Spiritual in Rural Gambia. *Anthropological Forum*, 34(1), 52–70. <https://doi.org/10.1080/00664677.2024.2358243>
- Winstedt, R. O. (1920). Hikayat Abu Nawas. *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, 81, 15–21.
- Wintersteiger, M. (2020). Enlightenment from the orient: The, philosophical esotericism’ of the falasifa. *Bogoslovni Vestnik*, 80(3), 585–594. <https://doi.org/10.34291/BV2020/03/Wintersteiger>